



BUPATI NGANJUK  
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGANJUK  
NOMOR 4 TAHUN 2023  
TENTANG  
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NGANJUK,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 317 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 177 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Bupati wajib mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk memperoleh persetujuan Bersama;
- b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD yang diajukan merupakan perwujudan dari Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 yang dijabarkan ke dalam perubahan kebijakan umum APBD serta perubahan prioritas dan plafon anggaran sementara yang telah disepakati antara Pemerintah Daerah dengan DPRD pada tanggal 6 bulan September tahun 2023;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

*M.*



3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
11. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
12. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);



14. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
22. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
23. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
24. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 112);
25. Peraturan Presiden Nomor 134 Tahun 2022 tentang Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 242);

M.



26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah;
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
32. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2022 Nomor 7);
33. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2023 Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Nganjuk.
2. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Nganjuk.
4. Bupati adalah Bupati Nganjuk.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nganjuk.



6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.
7. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah.
8. Pedoman Penyusunan APBD adalah pokok kebijakan sebagai petunjuk dan arah bagi pemerintahan daerah dalam penyusunan, pembahasan dan penetapan APBD.
9. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas daerah.
10. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas daerah.
11. Pendapatan Daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
12. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
13. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
14. Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk mendanai kebutuhan pembangunan prasarana dan sarana daerah yang tidak dapat dibebankan dalam 1 (satu) tahun anggaran.

## Pasal 2

Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 terdiri atas:

a. Pendapatan daerah		
1. Semula	Rp2.302.594.818.356,00	
2. Bertambah	<u>Rp306.800.701.183,00</u>	
Jumlah pendapatan daerah setelah perubahan		Rp2.609.395.519.539,00
b. Belanja daerah		
1. Semula	Rp2.573.094.818.356,00	
2. Bertambah	<u>Rp401.880.370.796,00</u>	
Jumlah belanja daerah setelah perubahan		Rp2.974.975.189.152,00
c. Pembiayaan daerah		
1. Penerimaan pembiayaan		
a) Semula	Rp277.000.000.000,00	
b) Bertambah	<u>Rp95.079.669.613,00</u>	
Jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan		Rp372.079.669.613,00
2. Pengeluaran pembiayaan		
a) Semula	Rp6.500.000.000,00	
b) Bertambah/ (berkurang)	<u>Rp0,00</u>	
Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan		Rp6.500.000.000,00
Jumlah pembiayaan neto setelah perubahan		<u>Rp365.579.669.613,00</u>
Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan		Rp0,00



Pasal 3

Anggaran pendapatan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, bersumber dari:

- a. Pendapatan asli daerah
  - 1. Semula Rp358.015.575.169,00
  - 2. Bertambah Rp14.409.167.524,00
  - Jumlah pendapatan asli daerah setelah perubahan Rp372.424.742.693,00
- b. Pendapatan transfer
  - 1. Semula Rp1.892.837.830.312,00
  - 2. Bertambah Rp290.254.256.832,00
  - Jumlah pendapatan transfer setelah perubahan Rp2.183.092.087.144,00
- c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah
  - 1. Semula Rp51.741.412.875,00
  - 2. Bertambah Rp2.137.276.827,00
  - Jumlah lain-lain pendapatan daerah yang sah setelah perubahan Rp53.878.689.702,00

Pasal 4

(1) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, bersumber dari:

- a. Pajak daerah
  - 1. Semula Rp118.381.200.000,00
  - 2. Bertambah Rp18.494.050.000,00
  - Jumlah pajak daerah setelah perubahan Rp136.875.250.000,00
- b. Retribusi daerah
  - 1. Semula Rp28.110.826.169,00
  - 2. Bertambah Rp1.149.514.055,00
  - Jumlah retribusi daerah setelah perubahan Rp29.260.340.224,00
- c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan
  - 1. Semula Rp3.741.455.500,00
  - 2. Bertambah Rp683.989.369,00
  - Jumlah hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah perubahan Rp4.425.444.869,00
- d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah
  - 1. Semula Rp207.782.093.500,00
  - 2. Berkurang (Rp5.918.385.900,00)
  - Jumlah lain-lain pendapatan asli daerah yang sah setelah perubahan Rp201.863.707.600,00

(2) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, bersumber dari:

- a. Transfer pemerintah pusat
  - 1. Semula Rp1.785.674.354.000,00
  - 2. Bertambah 189.463.186.144,00
  - Jumlah transfer pemerintah pusat setelah perubahan Rp1.975.137.540.144,00
- b. Transfer antar daerah
  - 1. Semula Rp107.163.476.312,00
  - 2. Bertambah Rp100.791.070.688,00
  - Jumlah transfer antar daerah setelah perubahan Rp207.954.547.000,00

*M.*



- (3) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, bersumber dari:
- a. Pendapatan hibah
    - 1. Semula Rp6.000.000.000,00
    - 2. Bertambah/  
(berkurang) Rp0,00
    - Jumlah pendapatan hibah setelah perubahan Rp6.000.000.000,00
  - b. Dana darurat
    - 1. Semula Rp0,00
    - 2. Bertambah/  
(berkurang) Rp0,00
    - Jumlah dana darurat setelah perubahan Rp0,00
  - c. Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
    - 1. Semula Rp45.741.412.875,00
    - 2. Bertambah Rp2.137.276.827,00
    - Jumlah lain lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah perubahan Rp47.878.689.702,00

Pasal 5

Anggaran belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas:

- a. Belanja operasi
  - 1. Semula Rp1.849.545.396.138,00
  - 2. Bertambah Rp249.647.084.343,00
  - Jumlah belanja operasi setelah perubahan Rp2.099.192.480.481,00
- b. Belanja modal
  - 1. Semula Rp230.542.632.396,00
  - 2. Bertambah Rp163.154.891.547,00
  - Jumlah belanja modal setelah perubahan Rp393.697.523.943,00
- c. Belanja tidak terduga
  - 1. Semula Rp39.435.280.762,00
  - 2. Berkurang (Rp22.564.350.694,00)
  - Jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan Rp16.870.930.068,00
- d. Belanja transfer
  - 1. Semula Rp453.571.509.060,00
  - 2. Berkurang Rp11.642.745.600,00
  - Jumlah belanja transfer setelah perubahan Rp465.214.254.660,00

Pasal 6

(1) Belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, terdiri atas:

- a. Belanja pegawai
  - 1. Semula Rp1.176.627.649.865,00
  - 2. Berkurang (Rp27.608.526.261,00)
  - Jumlah belanja pegawai setelah perubahan Rp1.149.019.123.604,00

M.



b. Belanja barang dan jasa			
1. Semula	Rp611.390.839.273,00		
2. Bertambah	<u>Rp214.158.526.460,00</u>		
Jumlah belanja barang dan jasa setelah perubahan			Rp825.549.365.733,00
c. Belanja bunga			
1. Semula		Rp0,00	
2. Bertambah/ (berkurang)		<u>Rp0,00</u>	
Jumlah belanja bunga setelah perubahan			Rp0,00
d. Belanja subsidi			
1. Semula		Rp0,00	
2. Bertambah/ (berkurang)		<u>Rp0,00</u>	
Jumlah belanja subsidi setelah perubahan			Rp0,00
e. Belanja hibah			
1. Semula	Rp49.674.207.000,00		
2. Bertambah	<u>Rp62.524.584.144,00</u>		
Jumlah belanja hibah setelah perubahan			Rp112.198.791.144,00
f. Belanja bantuan sosial			
1. Semula	Rp11.852.700.000,00		
2. Bertambah	<u>Rp572.500.000,00</u>		
Jumlah belanja bantuan sosial setelah perubahan			Rp12.425.200.000,00
(2) Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, terdiri atas:			
a. Belanja modal tanah			
1. Semula		Rp0,00	
2. Bertambah	<u>Rp1.700.000.000,00</u>		
Jumlah belanja modal tanah setelah perubahan			Rp1.700.000.000,00
b. Belanja modal peralatan dan mesin			
1. Semula	Rp38.532.063.499,00		
2. Bertambah	<u>Rp33.216.975.102,00</u>		
Jumlah belanja modal peralatan dan mesin setelah perubahan			Rp71.749.038.601,00
c. Belanja modal bangunan dan gedung			
1. Semula	Rp35.637.459.358,00		
2. Bertambah	<u>Rp97.771.633.010,00</u>		
Jumlah belanja modal bangunan dan gedung setelah perubahan			Rp133.409.092.368,00
d. Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi			
1. Semula	Rp125.541.104.939,00		
2. Bertambah	<u>Rp53.920.224.000,00</u>		
Jumlah belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi setelah perubahan			Rp179.461.328.939,00
e. Belanja modal aset tetap lainnya			
1. Semula	Rp30.367.004.600,00		
2. Berkurang	<u>(Rp23.378.940.565,00)</u>		
Jumlah belanja modal aset tetap lainnya setelah perubahan			Rp6.988.064.035,00

*lh*

- f. Belanja modal aset lainnya
- |   |                          |
|---|--------------------------|
| 1. Semula   | Rp465.000.000,00         |
| 2. Berkurang  | <u>(Rp75.000.000,00)</u> |
| Jumlah belanja modal aset lainnya setelah perubahan | Rp390.000.000,00         |
- (3) Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, terdiri atas belanja tidak terduga, yaitu:
- |  |                              |
|--|------------------------------|
| a. Semula                                      | Rp39.435.280.762,00          |
| b. Berkurang                                   | <u>(Rp22.564.350.694,00)</u> |
| Jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan | Rp16.870.930.068,00          |
- (4) Belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, terdiri atas:
- a. Belanja bagi hasil
- |   |                           |
|---|---------------------------|
| 1. Semula                                   | Rp14.647.034.160,00       |
| 2. Bertambah                                | <u>Rp3.177.745.600,00</u> |
| Jumlah belanja bagi hasil setelah perubahan | Rp17.824.779.760,00       |
- b. Belanja bantuan keuangan
- |   |                           |
|---|---------------------------|
| 1. Semula   | Rp438.924.474.900,00      |
| 2. Bertambah                                      | <u>Rp8.465.000.000,00</u> |
| Jumlah belanja bantuan keuangan setelah perubahan | Rp447.389.474.900,00      |

Pasal 7

Anggaran pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas:

- a. Penerimaan pembiayaan
- |  |                            |
|--|----------------------------|
| 1. Semula                                      | Rp277.000.000.000,00       |
| 2. Bertambah                                   | <u>Rp95.079.669.613,00</u> |
| Jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan | Rp372.079.669.613,00       |
- b. Pengeluaran pembiayaan
- |   |                       |
|---|-----------------------|
| 1. Semula                                       | Rp6.500.000.000,00,00 |
| 2. Bertambah/<br>(berkurang)                    | <u>Rp0,00</u>         |
| Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan | Rp6.500.000.000,00,00 |

Pasal 8

- (1) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, terdiri atas:
- a. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya
- |   |                            |
|---|----------------------------|
| 1. Semula   | Rp277.000.000.000,00       |
| 2. Bertambah  | <u>Rp95.079.669.613,00</u> |
| Jumlah sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya setelah perubahan | Rp372.079.669.613,00       |
- b. Pencairan dana cadangan
- |  |               |
|--|---------------|
| 1. Semula  | Rp0,00        |
| 2. Bertambah/<br>(berkurang)                     | <u>Rp0,00</u> |
| Jumlah pencairan dana cadangan setelah perubahan | Rp0,00        |



c.	Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan		
	1. Semula	Rp0,00	
	2. Bertambah/ (berkurang)	<u>Rp0,00</u>	
	Jumlah hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah perubahan		Rp0,00
d.	Penerimaan pinjaman daerah		
	1. Semula	Rp0,00	
	2. Bertambah/ (berkurang)	<u>Rp0,00</u>	
	Jumlah penerimaan pinjaman daerah setelah perubahan		Rp0,00
e.	Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah		
	1. Semula	Rp0,00	
	2. Bertambah/ (berkurang)	<u>Rp0,00</u>	
	Jumlah penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah setelah perubahan		Rp0,00
f.	Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan		
	1. Semula	Rp0,00	
	2. Bertambah/ (berkurang)	<u>Rp0,00</u>	
	Jumlah penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah perubahan		Rp0,00
(2)	Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, terdiri atas:		
a.	Pembentukan dana cadangan		
	1. Semula	Rp0,00	
	2. Bertambah/ (berkurang)	<u>Rp0,00</u>	
	Jumlah pembentukan dana cadangan setelah perubahan		Rp0,00
b.	Penyertaan modal daerah		
	1. Semula	Rp6.500.000.000,00	
	2. Bertambah/ (berkurang)	<u>Rp0,00</u>	
	Jumlah penyertaan modal daerah setelah perubahan		Rp6.500.000.000,00
c.	Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo		
	1. Semula	Rp0,00	
	2. Bertambah/ (berkurang)	<u>Rp0,00</u>	
	Jumlah pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo setelah perubahan		Rp.0,00
d.	Pemberian pinjaman daerah		
	1. Semula	Rp0,00	
	2. Bertambah/ (berkurang)	<u>Rp0,00</u>	
	Jumlah pemberian pinjaman daerah setelah perubahan		Rp0,00

ds

e. Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	
1. Semula	Rp0,00
2. Bertambah/ (berkurang)	<u>Rp0,00</u>
Jumlah pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah perubahan	Rp0,00

#### Pasal 9

Uraian lebih lanjut Perubahan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini terdiri dari:

- a. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
- b. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
- c. Lampiran III Rincian Perubahan APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Akun, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
- d. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja dan Kesesuaian Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan beserta Indikator dan Target Kinerjanya;
- e. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
- f. Lampiran VI Rekapitulasi Perubahan Belanja Untuk Pemenuhan SPM;
- g. Lampiran VII Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan Rancangan Perubahan APBD;
- h. Lampiran VIII Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dengan Rancangan Perubahan APBD;
- i. Lampiran IX Sinkronisasi Program Prioritas dan Kegiatan Prioritas Nasional dengan Program Prioritas Daerah;
- j. Lampiran X Sinkronisasi *Major Project* dengan Dukungan Program Prioritas Daerah;
- k. Lampiran XI Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
- l. Lampiran XII Daftar Piutang Daerah;
- m. Lampiran XIII Daftar Penyertaan Modal Daerah dan Investasi Daerah Lainnya;
- n. Lampiran XIV Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah dan Aset Lain-Lain;
- o. Lampiran XIV Daftar Sub Kegiatan Tahun Jamak (*Multi Years*);
- p. Lampiran XV Daftar Dana Cadangan; dan
- q. Lampiran XVI Daftar Pinjaman Daerah.



Pasal 10

Penjabaran Perubahan APBD sebagai landasan operasional pelaksanaan Perubahan APBD ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk.

Ditetapkan di Nganjuk  
pada tanggal 23 Oktober 2023

Pj. BUPATI NGANJUK,

ttd.

SRI HANDOKO TARUNA

Diundangkan di Nganjuk  
pada tanggal 23 Oktober 2023

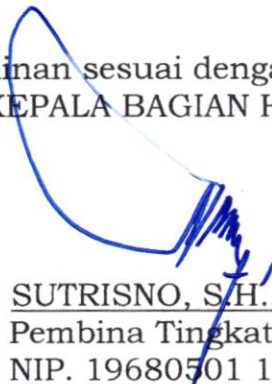
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN NGANJUK

ttd.

Drs. NUR SOLEKAN, M.Si.  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19661227 198602 1 001

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2023 NOMOR 4

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

  
SUTRISNO, S.H., M.Si.  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19680501 199202 1 001

**KABUPATEN NGANJUK**  
**RINGKASAN PERUBAHAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS**  
**PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2023**

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
<b>4</b>	<b>PENDAPATAN DAERAH</b>				
<b>4.1</b>	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>	<b>358.015.575.169</b>	<b>372.424.742.693</b>	<b>14.409.167.524</b>	<b>4 %</b>
4.1.01	Pajak Daerah	118.381.200.000	136.875.250.000	18.494.050.000	16 %
4.1.02	Retribusi Daerah	28.110.826.169	29.260.340.224	1.149.514.055	4 %
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	3.741.455.500	4.425.444.869	683.989.369	18 %
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	207.782.093.500	201.863.707.600	(5.918.385.900)	3 %
<b>4.2</b>	<b>PENDAPATAN TRANSFER</b>	<b>1.892.837.830.312</b>	<b>2.183.092.087.144</b>	<b>290.254.256.832</b>	<b>15 %</b>
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.785.674.354.000	1.975.137.540.144	189.463.186.144	11 %
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	107.163.476.312	207.954.547.000	100.791.070.688	94 %
<b>4.3</b>	<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</b>	<b>51.741.412.875</b>	<b>53.878.689.702</b>	<b>2.137.276.827</b>	<b>4 %</b>
4.3.01	Pendapatan Hibah	6.000.000.000	6.000.000.000	0	0 %
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	45.741.412.875	47.878.689.702	2.137.276.827	5 %
	<b>Jumlah Pendapatan</b>	<b>2.302.594.818.356</b>	<b>2.609.395.519.539</b>	<b>306.800.701.183</b>	<b>13 %</b>
<b>5</b>	<b>BELANJA</b>				
<b>5.1</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>1.849.545.396.138</b>	<b>2.099.192.480.481</b>	<b>249.647.084.343</b>	<b>13 %</b>
5.1.01	Belanja Pegawai	1.176.627.649.865	1.149.019.123.604	(27.608.526.261)	2 %
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	611.390.839.273	825.549.365.733	214.158.526.460	35 %
5.1.05	Belanja Hibah	49.674.207.000	112.198.791.144	62.524.584.144	126 %
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	11.852.700.000	12.425.200.000	572.500.000	5 %
<b>5.2</b>	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>230.542.632.396</b>	<b>393.697.523.943</b>	<b>163.154.891.547</b>	<b>71 %</b>
5.2.01	Belanja Modal Tanah	0	1.700.000.000	1.700.000.000	100 %
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	38.532.063.499	71.749.038.601	33.216.975.102	86 %
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	35.637.459.358	133.409.092.368	97.771.633.010	274 %
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	125.541.104.939	179.461.328.939	53.920.224.000	43 %
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	30.367.004.600	6.988.064.035	(23.378.940.565)	77 %
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	465.000.000	390.000.000	(75.000.000)	16 %
<b>5.3</b>	<b>BELANJA TIDAK TERDUGA</b>	<b>39.435.280.762</b>	<b>16.870.930.068</b>	<b>(22.564.350.694)</b>	<b>57 %</b>
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	39.435.280.762	16.870.930.068	(22.564.350.694)	57 %
<b>5.4</b>	<b>BELANJA TRANSFER</b>	<b>453.571.509.060</b>	<b>465.214.254.660</b>	<b>11.642.745.600</b>	<b>3 %</b>
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	14.647.034.160	17.824.779.760	3.177.745.600	22 %
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	438.924.474.900	447.389.474.900	8.465.000.000	2 %
	<b>Jumlah Belanja</b>	<b>2.573.094.818.356</b>	<b>2.974.975.189.152</b>	<b>401.880.370.796</b>	<b>16 %</b>
	<b>Total Surplus/(Defisit)</b>	<b>(270.500.000.000)</b>	<b>(365.579.669.613)</b>	<b>(95.079.669.613)</b>	<b>35 %</b>
<b>6</b>	<b>PEMBIAYAAN</b>				
<b>6.1</b>	<b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN</b>	<b>277.000.000.000</b>	<b>372.079.669.613</b>	<b>95.079.669.613</b>	<b>34 %</b>
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	277.000.000.000	372.079.669.613	95.079.669.613	34 %
6.1.05	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	0	0	0	0 %
	<b>Jumlah Penerimaan Pembiayaan</b>	<b>277.000.000.000</b>	<b>372.079.669.613</b>	<b>95.079.669.613</b>	<b>34 %</b>
<b>6.2</b>	<b>PENGELUARAN PEMBIAYAAN</b>	<b>6.500.000.000</b>	<b>6.500.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0 %</b>
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	6.500.000.000	6.500.000.000	0	0 %
	<b>Jumlah Pengeluaran Pembiayaan</b>	<b>6.500.000.000</b>	<b>6.500.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0 %</b>
	<b>Pembiayaan Netto</b>	<b>270.500.000.000</b>	<b>365.579.669.613</b>	<b>95.079.669.613</b>	<b>35 %</b>
<b>6.3</b>	<b>Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan</b>	<b>(0)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 %</b>

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM

SUTRISNO, SH, M.Si  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19680501 199202 1 001

Pj. BUPATI NGANJUK,

ttd.

SRI HANDOKO TARUNA



**KABUPATEN NGANJUK**  
**RINGKASAN PERUBAHAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI**  
**TAHUN ANGGARAN 2023**

Kode	Urusan Pemerintahan Daerah	Sebelum Perubahan					Sesudah Perubahan								
		Pendapatan	Belanja				Pendapatan	Belanja							
			Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer		Jumlah Belanja	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja		
7 01 7.01.0.00.0.00.14.0013	Kelurahan Werungotok	0	508.170.200	283.443.383	0	791.613.583	0	545.430.200	283.143.383	0	828.573.583	0	0	0	828.573.583
7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000	Kecamatan Ngetos	0	2.134.463.512	84.115.700	0	2.218.579.212	0	2.015.518.132	57.465.368	0	2.072.983.500	0	0	0	2.072.983.500
7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000	Kecamatan Ngluyu	0	1.760.924.589	29.432.900	0	1.790.357.489	0	1.870.121.100	29.432.900	0	1.899.554.000	0	0	0	1.899.554.000
7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000	Kecamatan Ngronggot	0	3.482.601.460	41.000.000	0	3.523.601.460	0	3.520.709.460	55.830.000	0	3.576.539.460	0	0	0	3.576.539.460
7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000	Kecamatan Pace	0	3.221.591.450	51.903.334	0	3.273.494.784	0	2.891.075.050	51.903.334	0	2.942.978.384	0	0	0	2.942.978.384
7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000	Kecamatan Patianrowo	0	2.791.429.644	82.712.800	0	2.874.142.444	0	2.747.440.850	112.712.800	0	2.860.153.650	0	0	0	2.860.153.650
7 01 7.01.0.00.0.00.20.0000	Kecamatan Prambon	0	2.833.583.950	30.557.100	0	2.864.141.050	0	2.921.315.950	43.877.100	0	2.965.193.050	0	0	0	2.965.193.050
7 01 7.01.0.00.0.00.21.0000	Kecamatan Rejoso	0	3.283.789.550	61.665.289	0	3.345.454.839	0	3.098.755.750	63.215.289	0	3.161.971.039	0	0	0	3.161.971.039
7 01 7.01.0.00.0.00.22.0000	Kecamatan Sawahan	0	2.823.761.850	41.350.000	0	2.865.111.850	0	2.860.261.850	55.508.000	0	2.915.769.850	0	0	0	2.915.769.850
7 01 7.01.0.00.0.00.23.0000	Kecamatan Sukomoro	0	3.297.260.322	26.360.000	0	3.323.620.322	0	3.286.500.422	56.000.000	0	3.342.500.422	0	0	0	3.342.500.422
7 01 7.01.0.00.0.00.23.0001	Kelurahan Sukomoro	0	485.788.350	295.980.000	0	781.768.350	0	501.199.850	308.170.000	0	809.369.850	0	0	0	809.369.850
7 01 7.01.0.00.0.00.23.0002	Kelurahan Kapas	0	502.832.000	338.649.000	0	841.481.000	0	541.552.000	338.649.000	0	880.201.000	0	0	0	880.201.000
7 01 7.01.0.00.0.00.24.0000	Kecamatan Tanjunganom	0	4.479.134.700	30.764.600	0	4.509.899.300	0	4.770.109.730	80.624.570	0	4.850.734.300	0	0	0	4.850.734.300
7 01 7.01.0.00.0.00.24.0002	Kelurahan Tanjunganom	0	443.500.000	146.500.000	0	590.000.000	0	478.620.000	150.100.000	0	628.720.000	0	0	0	628.720.000
7 01 7.01.0.00.0.00.24.0014	Kelurahan Warujayang	0	533.453.700	232.500.000	0	765.953.700	0	637.293.700	232.500.000	0	869.793.700	0	0	0	869.793.700
7 01 7.01.0.00.0.00.25.0000	Kecamatan Wilangan	0	2.301.834.050	38.018.189	0	2.339.852.239	0	2.293.730.050	37.906.389	0	2.331.636.439	0	0	0	2.331.636.439
<b>8</b>	<b>UNSUR PEMERINTAHAN UMUM</b>	<b>0</b>	<b>16.823.069.426</b>	<b>147.611.120</b>	<b>0</b>	<b>16.970.680.546</b>	<b>0</b>	<b>43.840.752.622</b>	<b>156.740.440</b>	<b>0</b>	<b>43.997.493.062</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>43.997.493.062</b>
<b>8 01</b>	<b>KESATUAN BANGSA DAN POLITIK</b>	<b>0</b>	<b>16.823.069.426</b>	<b>147.611.120</b>	<b>0</b>	<b>16.970.680.546</b>	<b>0</b>	<b>43.840.752.622</b>	<b>156.740.440</b>	<b>0</b>	<b>43.997.493.062</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>43.997.493.062</b>
8 01	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	0	16.823.069.426	147.611.120	0	16.970.680.546	0	43.840.752.622	156.740.440	0	43.997.493.062	0	0	0	43.997.493.062
	<b>TOTAL</b>	<b>2.302.594.818.356</b>	<b>1.849.545.396.138</b>	<b>230.542.632.396</b>	<b>453.571.509.060</b>	<b>2.573.094.818.356</b>	<b>2.609.395.519.539</b>	<b>2.099.192.480.481</b>	<b>393.697.523.943</b>	<b>16.870.930.068</b>	<b>2.974.975.189.152</b>	<b>465.214.254.660</b>	<b>2.974.975.189.152</b>	<b>16.870.930.068</b>	<b>2.974.975.189.152</b>

Salinan sesuai dengan aslinya  
**KEPALA BAGIAN HUKUM**

Pj. BUPATI NGANJUK,

ttd.

**SUTRISNO, S.H., M.Si**  
 Pembina Tingkat I  
 NIP. 19680501 199202 1 001

SRI HANDOKO TARUNA

**KABUPATEN NGANJUK**  
**RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2023**

Urusan Pemerintahan : 8.01 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK  
 Organisasi : 8.01.0.00.0.00.02 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Kode Rekening										Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
										<b>Urusan Pemerintahan Daerah</b>				
8	01	8.01.0.00.0.00.02.0000	01	2.09	02					Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	132.639.300	148.793.600	16.154.300	
8	01	8.01.0.00.0.00.02.0000	01	2.09	02	5	1			BELANJA OPERASI	132.639.300	148.793.600	16.154.300	
8	01	8.01.0.00.0.00.02.0000	01	2.09	02	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	132.639.300	148.793.600	16.154.300	
8	01	8.01.0.00.0.00.02.0000	01	2.09	06					Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	23.900.000	23.900.000	0	
8	01	8.01.0.00.0.00.02.0000	01	2.09	06	5	1			BELANJA OPERASI	23.900.000	23.900.000	0	
8	01	8.01.0.00.0.00.02.0000	01	2.09	06	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	23.900.000	23.900.000	0	
8	01	8.01.0.00.0.00.02.0000	01	2.09	09					Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	328.997.650	328.997.650	0	
8	01	8.01.0.00.0.00.02.0000	01	2.09	09	5	1			BELANJA OPERASI	327.797.650	327.797.650	0	
8	01	8.01.0.00.0.00.02.0000	01	2.09	09	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	327.797.650	327.797.650	0	
8	01	8.01.0.00.0.00.02.0000	01	2.09	09	5	2			BELANJA MODAL	1.200.000	1.200.000	0	
8	01	8.01.0.00.0.00.02.0000	01	2.09	09	5	2	02		Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.200.000	1.200.000	0	
<b>Jumlah Belanja</b>											<b>16.970.680.546</b>	<b>43.997.493.062</b>	<b>27.026.812.516</b>	
<b>Total Surplus/(Defisit)</b>											<b>(16.970.680.546)</b>	<b>(43.997.493.062)</b>	<b>(27.026.812.516)</b>	
0	00	8.01.0.00.0.00.02.0000	00	0.00	00	6				<b>PEMBIAYAAN</b>				
<b>Jumlah Penerimaan Pembiayaan</b>											<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Jumlah Penerimaan Pengeluaran</b>											<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Salinan sesuai dengan aslinya  
 KEPALA BAGIAN HUKUM

SUTRISNO, SH, M.Si  
 Pembina Tingkat I  
 NIP. 19680501 199202 1 001

Pj. BUPATI NGANJUK,

ttd.

SRI HANDOKO TARUNA

*Al*



**KABUPATEN NGANJUK**  
**REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2023**

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan				Sesudah Perubahan				Bertambah/(Berkurang)
		Belanja				Belanja				
		Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Jumlah Belanja	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Jumlah Belanja	
8 01 8 01 0 00 0 00 02 0000 06 2 01 06	Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	7.534.295.000	0	0	7.534.295.000	7.709.495.000	0	0	7.709.495.000	175.200.000
<b>TOTAL</b>		<b>1.849.545.396.138</b>	<b>230.542.632.396</b>	<b>39.435.280.762</b>	<b>2.573.094.818.356</b>	<b>2.099.192.480.481</b>	<b>16.870.930.068</b>	<b>465.214.254.660</b>	<b>2.974.975.189.152</b>	<b>401.880.370.796</b>

Salinan sesuai dengan aslinya  
 KEPALA BAGIAN HUKUM



**SUTRISNO / SH. M.Si**  
 Pembina/Tingkat I  
 NIP. 19680501 199202 1 001

Pj. BUPATI NGANJUK,

ttd.

SRI HANDOKO TARUNA



11 01 1 06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	8.175.432.150	22.761.700	0	0	0	8.198.193.850	11.983.723.050	22.761.700	0	0	0	12.006.484.750	3.808.290.900
11 02 2 08	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	654.823.400	0	0	0	0	654.823.400	787.858.200	0	0	0	0	787.858.200	133.034.800
11 03 3 32	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI	75.000.000	0	0	0	0	75.000.000	75.000.000	0	0	0	0	75.000.000	0
<b>TOTAL</b>		<b>1.849.545.396.138</b>	<b>230.542.632.396</b>	<b>39.435.280.762</b>	<b>453.571.509.060</b>	<b>2.573.094.818.356</b>	<b>2.099.192.480.481</b>	<b>393.697.523.943</b>	<b>16.870.930.068</b>	<b>465.214.254.660</b>	<b>2.974.975.189.152</b>	<b>2.974.975.189.152</b>	<b>401.880.370.796</b>	

Salinan sesuai dengan aslinya  
**KEPALA BAGIAN HUKUM**

Pj. BUPATI NGANJUK,

ttd.

SRI HANDOKO TARUNA

**SUTRISNO, S.H., M.Si**

Pembina Tingkat I

NIP. 19680501 199202 1 001

*Ms.*



**KABUPATEN NGANJUK**  
**REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA UNTUK PEMENUHAN SPM**  
**TAHUN ANGGARAN 2023**

No	Jenis Pelayanan Dasar	Kegiatan	Sub Kegiatan	Alokasi Anggaran (Sebelum Perubahan)	Alokasi Anggaran (Sesudah Perubahan)	Bertambah/ (Berkurang)
			Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	37.216.800	37.216.800	0
			Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	514.000.000	514.000.000	0
			Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	5.540.645.750	5.535.245.750	(5.400.000)
			Pemberian Layanan Kedaruratan	538.828.000	538.828.000	0
			<b>Jumlah Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial</b>	<b>6.630.690.550</b>	<b>6.625.290.550</b>	<b>(5.400.000)</b>
			<b>Jumlah Rehabilitasi Sosial dasar penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar serta gelandangan pengemis di luar panti</b>	<b>6.630.690.550</b>	<b>6.625.290.550</b>	<b>(5.400.000)</b>
			<b>Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial</b>			
			<b>Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota</b>			
			Penyediaan Makanan	217.478.050	217.478.050	0
			<b>Jumlah Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota</b>	<b>217.478.050</b>	<b>217.478.050</b>	<b>0</b>
			<b>Jumlah Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial</b>	<b>217.478.050</b>	<b>217.478.050</b>	<b>0</b>
			<b>Jumlah SPM Bidang Sosial</b>	<b>6.848.168.600</b>	<b>6.842.768.600</b>	<b>(5.400.000)</b>

Salinan sesuai dengan aslinya  
 KEPALA BAGIAN HUKUM

SUTRISNO, SH., M.Si  
 Pembina Tingkat I  
 NIP. 19680501 199202 1 001

Pj. BUPATI NGANJUK,

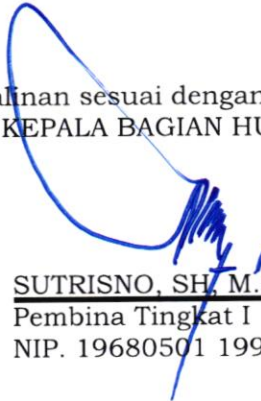
ttd.

SRI HANDOKO TARUNA

**KABUPATEN NGANJUK**  
**SINKRONISASI PROGRAM PADA RPJMD DENGAN PERUBAHAN APBD**  
**TAHUN ANGGARAN 2023**

Kode	Uraian	RPJMD (Rp)	APBD (Rp)		Bertambah/ (Berkurang) (Rp)	
			Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Jumlah	%
	DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK					
8 01 04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	0	713.217.800	1.182.600.000	469.382.200	66 %
8 01 05	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	471.699.500	55.899.960	155.899.960	100.000.000	179 %
8 01 06	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	2.529.062.500	7.912.330.200	8.087.530.200	175.200.000	2 %

Salinan sesuai dengan aslinya  
 KEPALA BAGIAN HUKUM

  
SUTRISNO, SH, M.Si  
 Pembina Tingkat I  
 NIP. 19680501 199202 1 001

Pj. BUPATI NGANJUK,

ttd.

SRI HANDOKO TARUNA





**KABUPATEN NGANJUK**  
**SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPd DAN PERUBAHAN PPAS**  
**DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD**  
**TAHUN ANGGARAN 2023**

Kode					Uraian	Perubahan RKPd (Rp)	Perubahan PPAS (Rp)	Perubahan APBD (Rp)
8.01.0.00.0.00.02.0000	8	01	05	2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	55.899.960	155.899.960	155.899.960
8.01.0.00.0.00.02.0000	8	01	05	2.01 04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	54.999.960	154.999.960	154.999.960
8.01.0.00.0.00.02.0000	8	01	05	2.01 05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	900.000	900.000	900.000
8.01.0.00.0.00.02.0000	8	01	06		PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	8.087.530.200	8.087.530.200	8.087.530.200
8.01.0.00.0.00.02.0000	8	01	06	2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	8.087.530.200	8.087.530.200	8.087.530.200
8.01.0.00.0.00.02.0000	8	01	06	2.01 04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	377.135.200	377.135.200	377.135.200
8.01.0.00.0.00.02.0000	8	01	06	2.01 05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	900.000	900.000	900.000
8.01.0.00.0.00.02.0000	8	01	06	2.01 06	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	7.709.495.000	7.709.495.000	7.709.495.000

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM

SUTRISNO, ST, M.Si  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19680501 199202 1 001

Pj. BUPATI NGANJUK,

ttd.

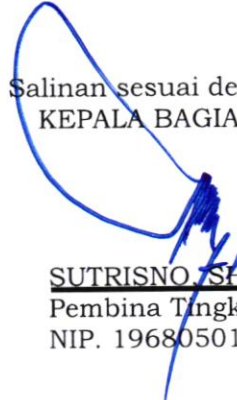
SRI HANDOKO TARUNA

*M.*

**KABUPATEN NGANJUK**  
**SIKRONISASI PROGRAM PRIORITAS NASIONAL DENGAN PROGRAM PRIORITAS DAERAH**  
**TAHUN ANGGARAN 2023**

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	SKPD Pelaksana	Alokasi Anggaran Belanja Dalam APBD				Alokasi Anggaran Belanja Dalam APBD-P				Jumlah	
				Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer		
				Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp
			Kecamatan Rejoso	56.862.050	0	0	0	65.662.050	0	0	0	65.662.050	100
			Kecamatan Sawahan	21.000.000	0	0	0	29.800.000	0	0	0	29.800.000	100
			Kecamatan Sukomoro	19.796.700	0	0	0	27.771.700	0	0	0	27.771.700	100
			Kecamatan Wilangan	22.872.800	0	0	0	31.672.800	0	0	0	31.672.800	100
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM													
			Kecamatan Baron	159.585.500	0	0	0	159.585.500	0	0	0	159.585.500	100
			Kecamatan Pace	39.362.500	0	0	0	35.152.500	0	0	0	35.152.500	100
			Kecamatan Sawahan	120.067.800	0	0	0	120.067.800	0	0	0	120.067.800	100
			Kecamatan Tanjunganom	10.350.000	0	0	0	10.350.000	0	0	0	10.350.000	100
			Kecamatan Wilangan	22.890.100	0	0	0	22.890.100	0	0	0	22.890.100	100
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA													
			Kecamatan Baron	7.475.900	0	0	0	7.475.900	0	0	0	7.475.900	100
			Kecamatan Lengkong	12.142.000	0	0	0	12.142.000	0	0	0	12.142.000	100
			Kecamatan Pace	34.388.000	0	0	0	29.138.000	0	0	0	29.138.000	100
			Kecamatan Sawahan	32.567.500	0	0	0	32.567.500	0	0	0	32.567.500	100

Salinan sesuai dengan aslinya  
 KEPALA BAGIAN HUKUM

  
SUTRISNO, SH. M.Si  
 Pembina Tingkat I  
 NIP. 19680501 199202 1 001

Pj. BUPATI NGANJUK,

ttd.

SRI HANDOKO TARUNA





**Sinkronisasi Major Project dengan Dukungan Program Prioritas Daerah**

No	Mayor Project	Program Prioritas Kabupaten Nganjuk	Program	Perangkat Daerah
12	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim	Menjadikan Kabupaten Nganjuk sebagai Agropolitan	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Dinas Lingkungan Hidup
			PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Dinas Lingkungan Hidup
			PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Dinas Lingkungan Hidup
			PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Dinas Lingkungan Hidup
			PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Dinas Lingkungan Hidup
			PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
			PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Salinan sesuai dengan aslinya  
 KEPALA BAGIAN HUKUM

SUTRISNO, SH, M.Si  
 Pembina Tingkat I  
 NIP. 19680501 199202 1 001

Pj. BUPATI NGANJUK,

ttd.

SRI HANDOKO TARUNA

GOLONGAN / RUANG	ESELON					NON ESELON		JUMLAH
	I	II	III	IV	V	TENAGA FUNSIONAL	STAF	
	Golongan IV/e						3	
Golongan IV/d		2	2	-		13		17
Golongan IV/c		19	-	-		158	-	177
Golongan IV/b		11	32	-		1.100	2	1.145
Golongan IV/a		1	101	35		301	7	445
<b>JUMLAH GOLONGAN IV</b>	-	<b>33</b>	<b>135</b>	<b>35</b>	-	<b>1.575</b>	<b>9</b>	<b>1.787</b>
Golongan III/d			29	288		879	112	1.308
Golongan III/c				48		341	84	473
Golongan III/b			1	24		1.386	277	1.688
Golongan III/a				1		315	946	1.262
<b>JUMLAH GOLONGAN III</b>	-	-	<b>30</b>	<b>361</b>	-	<b>2.921</b>	<b>1.419</b>	<b>4.731</b>
Golongan II/d						218	331	549
Golongan II/c						345	178	523
Golongan II/b						20	92	112
Golongan II/a						2	49	51
<b>JUMLAH GOLONGAN II</b>	-	-	-	-	-	<b>585</b>	<b>650</b>	<b>1.235</b>
Golongan I/d							55	55
Golongan I/c							5	5
Golongan I/b								-
Golongan I/a								-
<b>JUMLAH GOLONGAN I</b>	-	-	-	-	-	-	<b>60</b>	<b>60</b>
<b>TOTAL</b>	-	<b>33</b>	<b>165</b>	<b>396</b>	-	<b>5.081</b>	<b>2.138</b>	<b>7.813</b>

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM


SUTRISNO, SH. M.Si  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19680501 199202 1 001

Pj. BUPATI NGANJUK,

ttd.

SRI HANDOKO TARUNA



 <b>PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK</b> <b>DAFTAR PIUTANG DAERAH</b> <b>TAHUN ANGGARAN 2023</b>						
NO.	Uraian rincian piutang	Tahun pengakuan piutang	Jumlah piutang sampai dengan tahun N-2	Perkiraan penambahan tahun N-1	Perkiraan pengurangan tahun N-1	Perkiraan saldo akhir tahun N-1
1	2	3	4	5	6	7 = 4 + 5 - 6
1	Piutang Pajak	2022	8.618.942.632,00	0,00	0,00	8.618.942.632,00
2	Piutang Retribusi	2022	2.866.543.611,58	0,00	-	2.866.543.611,58
3	Piutang Lain-Lain PAD	2022	10.750.801,00	-	-	10.750.801,00
4	Piutang Lainnya	2022	1.721.845.822,00	-	-	1.721.845.822,00
5	Bagian Lancar TGR	2022	-	-	-	-
6	Piutang BLUD	2022	12.716.418.271,00	0,00	0,00	12.716.418.271,00
7	Piutang DBH Prov.	2022	11.080.607.500,00	0,00	0,00	11.080.607.500,00
8	Piutang Transfer	2022	0,00	0,00	0,00	-
9	Penyisihan Piutang	2022	(6.719.273.112,73)	-	-	(6.719.273.112,73)
<b>JUMLAH</b>			30.295.835.524,85	-	-	30.295.835.524,85

Salinannya sesuai dengan aslinya  
 KEPALA BAGIAN HUKUM

SUTRISNO, S.H., M.Si  
 Pembina Tingkat I  
 NIP. 19680501 199202 1 001

Pj. BUPATI NGANJUK,

ttd.

SRI HANDOKO TARUNA



**KABUPATEN NGANJUK**  
**DAFTAR PENYERTAAN MODAL DAERAH DAN INVESTASI DAERAH LAINNYA**  
**TAHUN ANGGARAN 2023**

No.	Tahun Penyertaan Modal	Nama Badan/Lembaga/ Pihak Ketiga	Dasar Hukum Penyertaan Modal (Investasi) Daerah	Bentuk Penyertaan Modal (Investasi) Daerah	Jumlah Penyertaan Modal (Investasi) Daerah	Jumlah Modal yang telah disertakan sampai tahun anggaran lalu	Penyertaan Modal tahun ini	Jumlah Modal yang telah disertakan sampai dengan tahun ini	Sisa Modal yang belum disertakan	Hasil Penyertaan Modal (Investasi) Daerah tahun ini	Jumlah Modal (Investasi) yang akan diterima kembali tahun ini	Jumlah Sisa Modal (Investasi) yang disertakan sampai dengan tahun ini
1	2	3	4	5	6	7 = 4 + 5 - 6	8	9 = 7 + 8	10	11	12	13 = 9 - 12
1	1967	Bank Jatim	No. 01 Th 2006 ttg APBD TA. 2006	Saham	-	19.304.463.500,00	-	19.304.463.500,00	-	4.099.495.868,86		19.304.463.500,00
2	1984	PDAU Nganjuk	Perda No. 169 th 62 ttg Perusahaan Daerah sebagaimana diubah yang kedua dengan Perda Kab Dati II Nganjuk No. 6 th 1993	Investasi	-	6.926.493.571,15	-	6.926.493.571,15	-	-		6.926.493.571,15
3	1978	PDAM Nganjuk	Perda No. 06 th 87 ttg Pendirian PDAM Kab Dati II Nganjuk Perda No. 06 th 2010 ttg Penyertaan Modal Daerah Pemkab Nganjuk kepada PDAM	Investasi	-	56.295.940.873,85	6.000.000.000,00	62.295.940.873,85	-	300.000.000,00		62.295.940.873,85
4	2000	BPR KURK Jatim	SK Pim DPRD No. 26 th 2006 Persetujuan Penambahan Penyertaan Saham PT. BPR Jatim	Saham	-	1.064.961.000,00	500.000.000,00	1.564.961.000,00	-	25.949.000,00		1.564.961.000,00
6	2005			Investasi dalam dana bergulir		2.389.630.216,63		2.389.630.216,63		-	6.225.800,00	2.383.404.416,63
5	2015	PT BPR Anjuk Ladang	<b>Perda No. 2 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Perda No. 3 Tahun 2016 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kab. Nganjuk pada BUMD Kab. Nganjuk</b>	investasi		36.700.000.000,00	-	36.700.000.000,00		-		36.700.000.000,00
JUMLAH						122.681.489.161,63	6.500.000.000,00	129.181.489.161,63	-	4.425.444.868,86	6.225.800,00	129.175.263.361,63

Pj. BUPATI NGANJUK,


ttd.

SRI HANDOKO TARUNA


Salinannya sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM

*Alu*  
SUTRISNO, SH, M.Si  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19680501 199202 1 001



 <b>KABUPATEN NGANJUK</b> <b>DAFTAR PERKIRAAN PENAMBAHAN DAN PENGURANGAN ASET LAIN-LAIN</b> <b>TAHUN ANGGARAN 2023</b>						
No.	Nama Aset	Jenis Aset	Saldo pada pada akhir tahun T-2	Perkiraan penambahan tahun T-1	Perkiraan pengurangan tahun T-1	Perkiraan saldo pada akhir tahun T-1
1	2	3	4	5	6	7 = 4 + 5 - 6
1	Tagihan TGR		-			-
2	Kemitraan dengan Pihak Ketiga		-	-	-	-
3	Aset Tak Berwujud		471.396.955,00	-	-	471.396.955,00
4	Amortisasi Aset Tak berwujud		-	-	-	-
5	Aset lain-lain		38.090.165.148,00	-	-	38.090.165.148,00
6	penyusutan aset lain-lain		-	-	-	-
7	Kas Yang Dibatasi Penggunaannya		-	-	-	-
<b>JUMLAH</b>			<b>38.561.562.103,00</b>	-	-	<b>38.561.562.103,00</b>

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM

  
SUTRISNO, SH, M.Si  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19680501 199202 1 001

Pj. BUPATI NGANJUK,

ttd.

SRI HANDOKO TARUNA



**KABUPATEN NGANJUK**  
**DAFTAR SUB KEGIATAN TAHUN ANGGARAN SEBELUMNYA YANG BELUM DISELESAIKAN**  
**DAN DIANGGARKAN KEMBALI DALAM TAHUN ANGGARAN YANG DIRENCANAKAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2023**

No.	Nama SKPD	Nama Sub Kegiatan	Lokasi Sub Kegiatan	Jumlah Anggaran T-1 (Rp)		Jumlah Realisasi Sampai Dengan Akhir TA. T-1 (Rp)	Jumlah sisa Anggaran yang Dianggarkan dalam Tahun ini (Rp)	
				APBD TA. T-1	Perubahan APBD TA. T-1 (Perubahan Perbup Penjabaran APBD)		APBD TA. T	Perubahan APBD TA. T
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		N I H I L						
<b>JUMLAH</b>				-	-	-		-

Salinannya sesuai dengan aslinya  
 KEPALA BAGIAN HUKUM

SUTRISNO, SH, M.Si  
 Pembina Tingkat I  
 NIP. 19680501 199202 1 001

Pj. BUPATI NGANJUK,

ttd.

SRI HANDOKO TARUNA







**KABUPATEN NGANJUK**  
**DAFTAR PINJAMAN DAERAH**  
**TAHUN ANGGARAN 2023**

No.	Sumber Pinjaman/ Obligasi Daerah	Dasar Hukum Pinjaman / Obligasi	Tanggal/Tahun Perjanjian Pinjaman/ Obligasi	Jumlah Pinjaman/ Nilai Nominal Obligasi	Jangka Waktu Pinjaman ( Tahun )	Presentase Bunga Pinjaman ( % )	Tujuan Penggunaan Pinjaman	Jumlah Pembayaran tahun ini (Rp)		Jumlah Sisa Pembayaran	
								Pokok Pinjaman Daerah	Bunga	Pokok Pinjaman Daerah	Bunga
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				<b>N I H I L</b>							
<b>JUMLAH</b>			-	-	-	-	-	-	-	-	-

Pj. BUPATI NGANJUK,

ttd.

SRI HANDOKO TARUNA

Salinan sesuai dengan aslinya  
 KEPALA BAGIAN HUKUM

SUTRISNO, SH. M.Si  
 Pembina Tingkat I  
 NIP. 19680501 199202 1 00